

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Cara untuk menentukan adanya akibat hukum dari suatu keputusan Tata Usaha Negara tidak di atur dalam doktrin yaitu :

Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata atau Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam perbuatan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.

Akibat hukum Tata Usaha Negara Tersebut berupa :

- a. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*).
- b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru. (*constitutief*).
- c. 1).Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada.

2).Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru .

2. Pertimbangan hukum hakim putusan Nomor 121/G/2015/PTUN-JKT telah sesuai dengan peraturan Undang-Undangan.

- a) Bahwa hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat mengenai kompetensi absolut sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 77 UU PTUN.
- b) Bahwa hakim menyatakan gugatan tidak dapat di terima karena terbukti surat keputusan yang dijadikan sebagai Objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, maka secara kumulatif surat keputusan objek sengketa tidak memenuhi syarat dan atau kriteria sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 angka 9 UU PTUN oleh karena sebabnya tidak dapat dijadikan objek sengketa a quo.

B. Saran

Bagi penggugat disarankan lebih cermat dan teliti dalam memperhatikan elemen-elemen atau unsur – unsur dalam KTUN terutama mengenai elemen atau unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bagi hakim agar lebih cermat dalam mempertimbangkan kasus terutama pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.